

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESIAPAN PEMERINTAH DAERAH PALEMBANG DALAM MENERIMA PENGALIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (STUDI KASUS PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PALEMBANG)

Yovina Maria Valentina (yovina.mvalentina@gmail.com)

Siti Khairani, Icha Fajriana

Jurusan Akuntansi S1
STIE MDP

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sudah sejauh mana kesiapan Pemerintah Kota Palembang dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) sebagai pajak daerah. Responden pada penelitian ini berjumlah 71 orang yang terdiri dari pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang. Hipotesis pada penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel faktor eksternal dan faktor internal terhadap kesiapan Pemerintah Daerah Palembang dalam menerima pengalihan pajak bumi dan bangunan. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yaitu wawancara dan dokumentasi. Dan teknik analisis data menggunakan tabelaris. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa sejauh ini Faktor internal yaitu Perda, Perkepda, dan SOP, Sumber Daya Manusia, Sarana dan prasarana, serta Kerja sama dengan pihak-pihak terkait memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesiapan pemerintah dalam pengelolaan penerimaan PBB. Walaupun beberapa faktor membutuhkan pengembangan dan peningkatan yang membuat pengelolaan PBB menjadi lebih baik. Faktor eksternal yaitu Wajib Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak. Telah terjadi peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran, namun tingkat kepatuhan ini masih perlu untuk ditingkatkan guna mencapai target PBB yang meningkat. Peningkatan penerimaan pajak merupakan salah satu indikasi terjadinya peningkatan kesadaran Wajib Pajak.

Kata kunci: Pengelolaan, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Pemerintah Daerah.

Abstract : This study aims to know how far of Palembang government in the management of land and building tax Rural and Urban (UN P2) as a local tax . Respondents in this study are 71 people consisting of employees of the Regional Revenue Office Palembang . The hypothesis in this study is that there is a significant effect of the external variable factors and internal factors of the Local Government Palembang 's readiness to accept the transfer of land and building tax . This research is a quantitative study that uses data collection techniques such as library research and field research interviews and data analysis techniques using documentation and tabulation . The results of this study indicate that internal factors such as local policy , and Standar operating procedures , Human Resources , Facilities and infrastructure , as well as cooperation with other parties have a significant effect on the readiness of the government in the management of tax admission . Although several factors require the development and improvement made for the better management. External factors that taxpayer has a significant influence on the acceptance of tax . There has been increased taxpayer compliance in making payments , but the level of compliance is still need to be improved in order to achieve the target of land and building tax. Increased tax revenue is one indication of the increasing awareness of the taxpayer.

Key Words : Management, Land and Building tax Rural and Urban (UN P2), Local Government.

1. Pendahuluan

Indonesia termasuk negara berkembang, yang memiliki berbagai sumber pendapatan salah satunya berasal dari pemungutan pajak, baik pajak pusat maupun pajak daerah yang menjadi sumber terbesar pendapatan Negara. Untuk itu pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan pajak, salah satunya melalui reformasi kebijakan perpajakan. Oleh sebab itu dari tahun ke tahun pemerintah terus berupaya untuk mengoptimalkan pemasukan pajak. Guna mendukung tujuan tersebut perlu adanya peraturan yang mendukung agar realisasi penerimaan pajak dapat tercapai. Salah satu pajak yang menjadi potensi sumber pendapatan negara kita yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang masuk dalam kategori Pajak Negara. Sejak tahun 2011 penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dilimpahkan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kota sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri nomor: 213/PMK.07/2010, nomor.58 tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah.

Berkaitan dengan fenomena diatas mengenai pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai Pajak Daerah, maka penulis tertarik untuk melakukan **Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan pemerintah Daerah Palembang dalam menerima pengalihan pajak bumi dan bangunan (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang).**

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Mardiasmo (2011, h.1) : “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

2.2 Fungsi Pajak

Umumnya terdapat 2 fungsi pajak yang dikenal, yaitu :

- a. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)
Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai contoh yaitu dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
- b. Fungsi Mengatur (*Regulered*)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dan barang mewah dapat ditekan .

2.3 Jenis pajak

Jenis pajak digolongkan menjadi 3 macam, yaitu:

- a. Menurut Golongannya :
 1. Pajak Langsung
 2. Pajak Tidak Langsung
- b. Menurut Sifatnya :
 1. Pajak Subjektif
 2. Pajak Objektif
- c. Menurut Lembaga Pemungutnya
 1. Pajak Pusat
 - a. Pajak Penghasilan (PPh)
 - b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
 - c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM).
 - d. Bea Meterai
 - e. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - f. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
 2. Pajak Daerah
 - a. Pajak Propinsi
 - b. Pajak Kabupaten/Kota

2.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem, yaitu sebagai berikut :

1) *Official Assessment system*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2) *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3) *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.5 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Soemitro (2006) Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas harta tidak bergerak, oleh sebab itu yang dipentingkan adalah objeknya dan oleh karena itu keadaan atau status orang atau badan yang dijadikan subjek tidak penting dan tidak mempengaruhi besarnya pajak, maka disebut juga pajak objektif. Pajak Bumi dan Bangunan adalah salah satu pajak pusat yang merupakan sumber penerimaan Negara yang sebagian besar hasilnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat daerah tempat objek pajak

2.6 Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata:

- a. Mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau ;
- b. Memperoleh manfaat atas bumi, dan / atau ;
- c. Memiliki, menguasai atas bangunan, dan / atau ;
- d. Memperoleh manfaat atas bangunan

2.7 Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Ditinjau dari jenis pajaknya, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan. Bumi merupakan permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya, permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa dan tambak perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 Pasal 77 ayat (1), yang menjadi Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/ atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Undang-undang memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk mengatur tentang klasifikasi objek pajak. yang dimaksud dengan klasifikasi objek bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman serta untuk memudahkan penghitungan pajak terhutang. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp.10.000.000 untuk setiap Wajib pajak.

2.8 Dasar Pengenaan dan Perhitungan PBB

Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya

100% dari Nilai Jual Objek Pajak. Sedangkan besarnya terutang dapat dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Nilai Jual Kena Pajak

2.9 Peralihan Pemungutan PBB

Sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 213/PMK.07/2010 Nomor: 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah, dalam rangka pengalihan kewenangan pemungutan PBB-P2 tersebut pemerintah daerah bertugas dan bertanggungjawab untuk menyiapkan sarana dan prasarana; struktur organisasi dan tata kerja; sumber daya manusia; peraturan daerah, peraturan Kepala Daerah, dan SOP; kerjasama dengan pihak terkait, antara lain dengan Kantor Pelayanan Pajak, Perbankan, Kantor Pertanahan, Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah; serta pembukaan rekening penerimaan PBB P2 pada bank yang sehat.

3. Metode Penelitian

3.1 Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian kuantitatif. Dalam hal ini, pendekatan kuantitatif dirasa lebih baik dalam mengukur nilai variabel-variabel tersebut karena menggunakan standar statistika yang dipakai secara umum dalam dunia akademis.

3.2 Subjek dan Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah kesiapan sumber daya manusia pemerintah dalam menanggapi peralihan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan menjadi Pajak Daerah. Subjek penelitian ini adalah pegawai atau staff pemerintah daerah Kota Palembang dalam hal penarikan pajak daerah .

3.3 Teknik pengambilan sampel

Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang diambil adalah teknik sampling nonprobabilitas dengan cara penarikan sampel secara *purposive sampling* atau *judgmental sampling*.

3.4 Jenis data

Penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan pertanyaan kuisioner/angket yang diberikan kepada responden sedangkan data sekunder diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Studi kepustakaan (*Library Research*), untuk memperoleh data sekunder dipergunakan studi kepustakaan, yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip, dan merangkum data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.
- b. Kuisioner, mengadakan kuisioner yang ditujukan kepada responden yang ditentukan.
- c. Dokumen, mengambil data dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang sebagai pendukung dalam penelitian.

3.6 Operasional Variabel

Penelitian ini menggunakan 2 variabel, yaitu :

- a. Variabel Bebas (*Independen*)

Yaitu variabel yang merupakan rangsangan untuk mempengaruhi variabel yang lain. Yang menjadi variabel bebas adalah faktor internal yaitu Perda, Perkepda, dan SOP, Sumber Daya Manusia, Sarana dan prasarana , Kerja sama dengan pihak-pihak terkait, serta faktor eksternal yaitu Wajib Pajak.

b. Variabel Terikat (*Dependen*)

Yaitu suatu jawaban atas hasil dari perilaku yang dirangsang. Dalam hal ini yang menjadi variabel terikat adalah kesiapan pemerintah Daerah Palembang.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan tabelaris. Menurut Hasan (2006 ,h.29) Tabelaris adalah pembuatan tabel-tabel yang berisi data yang telah diberi kode sesuai dengan analisis yang dibutuhkan.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

Responden pada penelitian ini adalah pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang. Berdasarkan data, jumlah pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang berjumlah 246 orang. Kuesioner yang didistribusikan sebanyak 71 kuesioner yang disebarkan kepada pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang. Berikut hasil kuesioner yang dibagikan pada responden:

1. Penerimaan PBB Meningkat Setelah Pengalihan Penerimaan PBB Menjadi Pajak Daerah.

Pegawai Dispenda yang menyatakan setuju sebanyak 68 responden, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 3 orang dan tidak ada responden yang tidak menjawab.

2. Kebijakan/peraturan yang Ditetapkan oleh Pemda Diadopsi oleh Pemda dari DJP.

Pegawai Dispenda yang menyatakan setuju sebanyak 18 responden, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 48 orang dan responden yang tidak menjawab sebanyak 5 orang atau 7%.

3. Tarif PBB yang Ditetapkan Tidak Berubah Setelah Adanya Pengalihan Penerimaan PBB.

Pegawai Dispenda yang menyatakan setuju sebanyak 6 responden. Sedangkan responden yang menyatakan tidak setuju sebanyak 65 orang dan tidak ada responden yang tidak menjawab.

4. Perekrutan SDM Dilakukan oleh Dispenda dengan Melihat Keahlian atau Kompetensi Khusus yang Dimiliki oleh Pegawai yang ada Di Lingkungan Dispenda yang Dianggap Sesuai dengan yang Dibutuhkan dalam Mengelola PBB P2.

Pegawai Dispenda yang menyatakan setuju sebanyak 43 responden, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 28 orang dan tidak ada responden yang tidak menjawab.

5. Kesiapan Sumber Daya Manusia di Pemerintahan Pada Masa Awal Pengalihan Belum Optimal, Sehingga Dapat Berdampak pada Penurunan Pelayanan, Penerimaan, Dll.

Pegawai Dispenda yang menyatakan setuju sebanyak 27 responden, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 44 orang dan tidak ada responden yang tidak menjawab.

6. Solusi yang Paling Sering Dilakukan Pemerintah untuk Meningkatkan Penerimaan PBB yaitu Sosialisasi Melalui Media Massa.

Pegawai Dispenda yang menyatakan setuju sebanyak 60 responden, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 11 orang dan tidak ada responden yang tidak menjawab.

7. Semua Perangkat Keras dan Perangkat Lunak yang Dibutuhkan dalam Pengelolaan PBB P2 Telah Dimiliki oleh UPTD PBB.

Pegawai Dispenda yang menyatakan setuju sebanyak 58 responden, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 13 orang dan tidak ada responden yang tidak menjawab.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan kepada Wajib Pajak Menjadi Lebih Baik Karena Sarana dan Prasarana Lebih Memadai.

Pegawai Dispenda yang menyatakan setuju sebanyak 51 responden, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 20 orang dan tidak ada responden yang tidak menjawab.

9. Sarana dan Prasarana adalah Kebutuhan Mayoritas dalam Pengelolaan Penerimaan PBB.

Pegawai Dispenda yang menyatakan setuju sebanyak 39 responden, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 32 orang dan tidak ada responden yang tidak menjawab.

10. Belum ada Perjanjian antara Dispenda Melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pajak Bumi dan Bangunan (UPTD PBB) dengan Pihak Lain yang Terkait.

Pegawai Dispenda yang menyatakan setuju sebanyak 17 responden, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 42 orang dan responden yang tidak menjawab sebanyak 12 orang.

11. Proses Kerja Sama dengan Pihak-Pihak Terkait Seperti Kerja Sama dengan Notaris/PPAT, BPN dan Bank

Tidak Membutuhkan Waktu yang Lama serta Prosedur yang Sulit.

Pegawai Dispenda yang menyatakan setuju sebanyak 39 responden, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 29 orang dan responden yang tidak menjawab sebanyak 3 orang.

12. Pihak Lain yang Bekerja Sama adalah Pihak yang Sebelumnya Bekerja sama dengan DJP.

Pegawai Dispenda yang menyatakan setuju sebanyak 52 responden, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 19 orang dan tidak ada responden yang tidak menjawab.

13. Hambatan Utama Rendahnya Penerimaan PBB adalah Kesadaran Masyarakat yang Masih Rendah.

Pegawai Dispenda yang menyatakan setuju sebanyak 66 responden, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 5 orang dan tidak ada responden yang tidak menjawab.

14. Dari Jumlah Keseluruhan Wajib Pajak PBB, hanya 55%-70% Wajib Pajak yang Taat Membayar PBB.

Pegawai Dispenda yang menyatakan setuju sebanyak 17 responden, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 51 orang dan responden yang tidak menjawab sebanyak 3 orang.

15. Kebijakan Tarif PBB yang Dilakukan Pemerintah Daerah Menimbulkan Gejolak di Masyarakat.

Pegawai Dispenda yang menyatakan setuju sebanyak 17

responden, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 54 orang dan tidak ada responden yang tidak menjawab.

4.2 Pembahasan

1. Penerimaan PBB Meningkat Setelah Pengalihan Penerimaan PBB Menjadi Pajak Daerah.

Pegawai di Dispenda rata-rata menyetujui penerimaan PBB meningkat setelah adanya pengalihan penerimaan PBB yang menjadi pajak daerah.

2. Kebijakan/peraturan yang Ditetapkan oleh Pemda Diadopsi oleh Pemda dari DJP.

Pegawai Dispenda rata-rata tidak setuju jika kebijakan/peraturan yang ditetapkan oleh pemda diadopsi dari DJP.

3. Tarif PBB yang Ditetapkan Tidak Berubah Setelah Adanya Pengalihan Penerimaan PBB.

Rata-rata pegawai Dispenda tidak menyetujui jika tarif PBB tidak mengalami perubahan setelah adanya pengalihan penerimaan PBB. Karena tarif PBB yang berlaku saat ini berubah sejak adanya pengalihan penerimaan PBB dari 0,2% menjadi 0,3%.

Dari 3 pertanyaan tersebut yang berasal dari indikator pertama yaitu Perda, Perkepada, dan SOP dapat disimpulkan bahwa Perda, Perkepada, dan SOP memiliki pengaruh terhadap pengalihan penerimaan PBB menjadi Pajak Daerah.

4. Perekrutan SDM Dilakukan oleh Dispenda dengan Melihat Keahlian atau Kompetensi Khusus yang Dimiliki oleh Pegawai yang ada Di

Lingkungan Dispenda yang Dianggap Sesuai dengan yang Dibutuhkan dalam Mengelola PBB P2.

Rata-rata pegawai Dispenda menyetujui perekrutan SDM yang dilakukan Dispenda melihat keahlian/kompetensi khusus yang dimiliki pegawai yang ada di lingkungan Dispenda yang dianggap sesuai dengan kebutuhan dalam mengelola PBB-P2. Dan dilakukan perekrutan beberapa pegawai untuk mengelola PBB-P2.

5. Kesiapan Sumber Daya Manusia di Pemerintahan Pada Masa Awal Pengalihan Belum Optimal, Sehingga Dapat Berdampak pada Penurunan Pelayanan, Penerimaan, Dll.

Rata-rata pegawai Dispenda tidak setuju bahwa kesiapan SDM dipemerintahan pada masa awal pengalihan belum optimal yang berdampak pada penurunan pelayanan, penerimaan, dll. Karena peralihan PBB-P2 ini sempat melewati masa transisi.

6. Solusi yang Paling Sering Dilakukan Pemerintah untuk Meningkatkan Penerimaan PBB yaitu Sosialisasi Melalui Media Massa.

Rata-rata pegawai Dispenda menyetujui jika solusi yang paling sering dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan PBB adalah sosialisasi melalui media massa. Karena sosialisasi melalui media massa lebih dekat dengan masyarakat.

Dari 3 pertanyaan tersebut yang berasal dari indikator kedua yaitu sumber daya

manusia dapat diketahui bahwa sumber daya manusia memiliki pengaruh terhadap jalannya pengalihan penerimaan PBB. Karena SDM yang menjalankan tugas seperti pelayanan, penagihan, penerimaan, dll.

7. Semua Perangkat Keras dan Perangkat Lunak yang Dibutuhkan dalam Pengelolaan PBB P2 Telah Dimiliki oleh UPTD PBB.

Rata-rata pegawai Dispenda setuju semua perangkat keras dan perangkat lunak yang dibutuhkan dalam pengelolaan PBB-P2 telah dimiliki UPTD PBB.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan kepada Wajib Pajak Menjadi Lebih Baik Karena Sarana dan Prasarana Lebih Memadai.

Rata-rata pegawai Dispenda setuju sarana dan prasarana yang memadai dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak.

9. Sarana dan Prasarana adalah Kebutuhan Mayoritas dalam Pengelolaan Penerimaan PBB.

Rata-rata pegawai Dispenda setuju bahwa sarana dan prasarana termasuk kebutuhan mayoritas dalam pengelolaan penerimaan PBB. Karena sarana dan prasarana merupakan faktor pendukung utama dalam pengelolaan PBB.

Dari 3 pertanyaan tersebut yang berasal dari indikator ketiga yaitu sarana dan prasarana dapat dikatakan bahwa sarana prasarana merupakan faktor yang mempengaruhi penerimaan PBB.

10. Belum ada Perjanjian antara Dispenda Melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pajak Bumi dan Bangunan (UPTD PBB) dengan Pihak Lain yang Terkait.

Rata-rata pegawai Dispenda tidak menyetujui jika belum ada perjanjian antara Dispenda dengan pihak lain yang terkait. Karena sekarang perjanjian antara Dispenda dan pihak lain telah selesai diproses.

11. Proses Kerja Sama dengan Pihak-Pihak Terkait Seperti Kerja Sama dengan Notaris/PPAT, BPN dan Bank Tidak Membutuhkan Waktu yang Lama serta Prosedur yang Sulit.

Rata-rata pegawai Dispenda setuju jika kerja sama dengan pihak lain tidak membutuhkan waktu yang lama.

12. Pihak Lain yang Bekerja Sama adalah Pihak yang Sebelumnya Bekerja sama dengan DJP.

Rata-rata pegawai Dispenda setuju bahwa pihak lain yang bekerja sama dengan Dispenda merupakan pihak yang sebelumnya bekerja sama dengan DJP. Sehingga proses kerja sama berjalan dengan mudah.

Dari 3 pertanyaan diatas yang berasal dari indikator keempat yaitu kerja sama dengan pihak pihak terkait dapat dikatakan bahwa kerja sama dengan pihak lain mempengaruhi penerimaan PBB. Sehingga proses penerimaan mengalami kemudahan.

13. Hambatan Utama Rendahnya Penerimaan PBB adalah

Kesadaran Masyarakat yang Masih Rendah.

Rata-rata pegawai Dispenda setuju bahwa kesadaran masyarakat yang masih rendah merupakan hambatan utama dalam penerimaan PBB.

14. Dari Jumlah Keseluruhan Wajib Pajak PBB, hanya 55%-70% Wajib Pajak yang Taat Membayar PBB.

Rata-rata pegawai Dispenda tidak setuju jika hanya 55%-70% Wajib Pajak yang taat membayar PBB.

15. Kebijakan Tarif PBB yang Dilakukan Pemerintah Daerah Menimbulkan Gejolak di Masyarakat.

Rata-rata pegawai Dispenda tidak menyetujui bahwa kebijakan tarif PBB menimbulkan gejolak di masyarakat. Karena tarif PBB yang diterapkan sekarang masih dalam taraf yang sesuai.

Dari 3 pertanyaan diatas yang berasal dari faktor eksternal dengan indikator Wajib Pajak dapat dikatakan bahwa Wajib Pajak merupakan faktor yang mempengaruhi penerimaan PBB.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada Bab IV, maka penulis dapat menarik kesimpulan, yaitu :

- a. Faktor internal yaitu Perda, Perkepada, dan SOP, Sumber Daya Manusia, Sarana dan prasarana, serta Kerja sama dengan pihak-pihak terkait memiliki pengaruh yang terhadap kesiapan

pemerintah dalam pengelolaan penerimaan PBB. Walaupun sumber daya manusia, sarana prasarana, dan kerja sama dengan pihak-pihak terkait membutuhkan pengembangan dan peningkatan yang membuat pengelolaan PBB menjadi lebih baik.

- b. Faktor eksternal yaitu Wajib Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak. Telah terjadi peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran, namun tingkat kepatuhan ini masih perlu untuk ditingkatkan guna mencapai target PBB yang meningkat. Peningkatan penerimaan pajak merupakan salah satu indikasi terjadinya peningkatan kesadaran Wajib Pajak

Secara garis besar faktor internal maupun faktor eksternal sudah berjalan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada.

5.2 Saran

Setelah diterapkannya peralihan mengenai pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan ke Pemerintah Daerah, hal ini khususnya Dinas Pendapatan Daerah, maka saran dari penulis adalah Dispenda sebaiknya meningkatkan kegiatan sosialisasi PBB diseluruh wilayah Kota Palembang sebagai peningkatan pelayanan. Karena dengan sosialisasi yang baik, maka penerimaan PBB akan meningkat.

Daftar Pustaka

- [1] Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang 2011, *Pengalihan PBB*,

- Diakses 21 September 2013, dari <http://www.pajak.go.id/content/pengalihan-pbb-perdesaan-dan-perkotaan>.
- [2] Mardiasmo 2006, *Perpajakan*, Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta.
- [3] Masfita, Vitriana, Agus Suryono, dan Ratih Nurpratiwi 2012, *Perencanaan Pemerintah Kabupaten Kudus Dalam Mempersiapkan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah*, Universitas Brawijaya, Vol. 15, No. 3.
- [4] Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- [5] Resmi, Siti 2011, *Perpajakan: Teori dan Kasus*, edisi ke-6, Salemba Empat, Jakarta.
- [6] Sugiyono 2012, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, ALFABETA, Bandung.
- [7] Supriyanto, Heru 2013, *Rahasia dibalik PBB P2 dan BPHTB*, Diakses 17 November 2013, dari <http://www.bppk.depkeu.go.id/webpajak/index.php/artikel/ok-pbb/1080-rahasia-di-balik-pbb-p2-a-bphtb>.
- [8] Zakky 2012, *Pajak Bumi dan Bangunan*, Diakses 17 September 2013, dari <http://zqzakky.blogspot.com/2012/02/pajak-bumi-dan-bangunan.html>.